

**EXECUTIVE SUMMARY
DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2019**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**



RINGKASAN EXECUTIVE

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur pulau Sumatera berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (SIBAJO). Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang.

Iklm merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap berhasil tidaknya pembangunan pertanian maupun non pertanian. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Berdasarkan Zona Agroklimat B 1 dengan 8 bulan basah (bulan dengan curah hujan > 200 mm) dan 2 bulan kering (bulan dengan curah hujan < 100 mm) berturut-turut. Bulan basah terjadi pada bulan Oktober sampai April, sedangkan bulan kering terjadi mulai bulan Juni sampai Agustus.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki iklim yang cukup baik serta curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi bila musim panas tiba, Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah yang rawan kebakaran. Hal ini disebabkan sebagian besar tanaman yang ada adalah tanaman sawit dan tanah gambut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian Ibukota. Ketinggian rata-rata ibu kota kecamatan antara 1–5 m dpl, dengan luas wilayah 5.445 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten . Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Ma Jambi.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 sebanyak 219.985 jiwa, selama kurun 2018-2019 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,72% pertahun. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Timur sebesar 31.475 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mendahara Ulu dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 2,89%, diikuti oleh Kecamatan Muara Sabak Barat sebesar 1,70%. Laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kecamatan Dendang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,13% pertahun.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 sebesar 40,40 jiwa/km², hal ini berarti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap 1 km² terdapat 40 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kuala Jambi sebanyak 122,43 jiwa/km².

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 disusun untuk menjelaskan kondisi lingkungan (state), faktor pendorong (driving force) yang mengakibatkan adanya tekanan (pressure) terhadap lingkungan sehingga menimbulkan dampak (impact) dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (response). Penyusunan Dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, penentuan isu prioritas dengan melibatkan masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan pendekatan Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR Analysis).



II. ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE (DPSIR ANALYSIS)

1. Tata Guna Lahan

a. Driving Force

Pertambahan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun yang semakin meningkat, disertai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang semakin naik, merupakan konsekuensi logis dalam memajukan kondisi sosial, ekonomi dan fisik suatu daerah yang akan menuntut kebutuhan ruang yang lebih luas untuk perumahan, pendidikan, pertanian, dan fasilitas umum lainnya.

b. Pressure

Pertumbuhan penduduk, kegiatan pertambangan dan penggalian yang mendominasi sampai 50% struktur ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung timur akan menyebabkan perubahan pada tataguna lahan, dan kegiatan pertambangan dan penggalian akan membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatannya.

c. State

Luas kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012, terdiri dari Kawasan Hutan Lindung 12,23%, kawasan Sempadan Pantai 4,92%, kawasan Sempadan Sungai 8,91%, kawasan Ruang Terbuka Hijau 0,39%, kawasan Kawasan Suaka Laut dan Perairannya 0,10%, kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 2,13%, kawasan Pantai Berhutan Bakau 71,21% dan Kawasan Imbuhan Air Tanah 0,10%.



d. Impact

Tekanan tataguna lahan yang paling utama adalah penambahan penduduk yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,70%, (tahun 2018-2019). Pertambahan penduduk tersebut menyebabkan penambahan pada lahan permukiman untuk membuat perumahan/tempat tinggal, penambahan luasan permukiman tentu akan mengurangi luasan yang lainnya.

Kemudahan berinvestasi diberbagai bidang seperti pertambangan dan perkebunan menyebabkan masyarakat berantusias/bersemangat untuk menanamkan modalnya pada bidang perkebunan dan pertambangan, mengingat sektor tersebut sangat menjanjikan. Sampai tahun 2019 Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan izin perkebunan seluas 216.550 hektar tatapi yang baru diusahakan untuk lahan perkebunan adalah 194.325 Ha. Dan izin bahan galian pasir sungai seluas 181,33 Ha. Proses perizinan untuk usaha pertambangan tidak dilaksanakan di kabupaten Tanjung Jabung Timur karena kewenangannya pada Dinas ESDM Propinsi Jambi. Tahun 2019 perizinan untuk usaha pertambangan adalah berupa penambangan pasir sungai yang diusahakan oleh masyarakat secara perorangan dan saat ini sudah mulai beroperasi

e. Response

Deteksi dini mengenai adanya kebakaran lahan dilakukan melalui monitoring titik panas (hotspot) sumber informasinya berasal dari website lahan dan BMKG, sepanjang tahun 2019 titik hotspot berjumlah 663 titik yang terdapat pada 11 kecamatan yang ada di kabupaten



Tanjung Jabung Timur. Banyaknya titik panas (hotspot) menjadi indikasi dari banyaknya kebakaran lahan yang terjadi pada suatu wilayah, walaupun tidak semua titik panas (hotspot) yang terpantau tersebut ada kejadian kebakaran lahan. Karena yang terpantau tersebut titik panas bukan titik api, bisa jadi di lokasi tersebut terdapat kandungan batubara atau kawasan industri batu bata yang sedang melakukan pembakaran batu bata secara bersama-sama, atau membuka lahan dengan membakarnya.

2. Kualitas Air

a. Driving Force

Peningkatan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat menjadi pendorong penurunan kualitas air. Peningkatan penduduk menyebabkan peningkatan permukiman diikuti peningkatan volume air limbah domestik, dan menuntut pemenuhan kebutuhan manusia berupa barang/jasa yang memicu bertambahnya jumlah industri. Selain itu, adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai akan memperburuk kualitas air permukaan

b. Pressure

Penyebab penurunan kualitas air adalah air limbah yang tidak dikelola dengan baik. Potensi air limbah domestik berasal dari aktivitas penduduk sehingga dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta berkembangnya industri perhotelan, perdagangan dan rumah sakit.

c. State

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2019 telah dilakukan berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari parameter TSS, BOD, COD, Fecal Coliform dan Total Coliform dan menunjukkan hasil pada pemeriksaan



semester I, bahwa 27 lokasi pengambilan sampel air sungai memiliki status mutu air tercemar ringan sebanyak 17 lokasi dan 9 dengan status memenuhi syarat dan 1 lokasi tidak dilakukan pengukuran. Sedangkan pada pemeriksaan semester II menunjukkan hasil 15 dengan status tercemar ringan, 11 memenuhi syarat dan 1 tidak dilakukan pengukuran yaitu titik pantau Sungai Jambat.

d. Impact

Adanya faktor pemicu dan tekanan terhadap kualitas air berdampak kepada penurunan kualitas air, yang ditandai adanya peningkatan konsentrasi parameter kualitas air. Penurunan kualitas air akan menyebabkan berkurangnya sumber air bersih dan memicu penyakit seperti diare dan gangguan sistem pencernaan lainnya

e. Response

Respon terhadap penurunan kualitas air yang dilakukan :

- (1) pemantauan kualitas air oleh Laboratorium DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- (b) program Pamsimas telah menyentuh 36.962 penduduk.
- (c) pengawasan dan penegakan hukum mewajibkan perusahaan yang menghasilkan air limbah untuk melakukan pengelolaan dengan pengujian sampel air limbah setiap bulan sesuai parameter kunci yang ditetapkan dan melaporkan hasil ujinya setiap 3 (tiga) bulan.

3. Kualitas Udara

a. Driving Force

Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor pendorong dalam



penurunan kualitas udara. Pola konsumtif masyarakat turut menyebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sehingga meningkatkan potensi polusi udara

b. Pressure

Peningkatan jumlah moda transportasi akan meningkatkan paparan konsentrasi gas buang yang berdampak pada pencemaran udara oleh emisi dari sumber bergerak, dan seiring bertambahnya jumlah industri berdampak terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi sumber tak bergerak yang berasal dari penggunaan batubara, BBM dan bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri.

c. State

Hasil pengukuran parameter SO₂ pada 4 (empat) titik lokasi sampling menunjukkan bahwa konsentrasi Sulfur Dioksida (SO₂) rata-ratakawasan perkantoran 10,97µg/Nm³, kawasan pemukiman 6.625 µg/Nm³, kawasan transportasi 8,785 µg/Nm³, dan kawasan industri 13,39 µg/Nm³, dapat dilihat pada gambar 2.26 masih dibawah standar baku mutu, Batas Maksimal Baku Mutu Lingkungan parameter Sulfur Dioksida (SO₂) adalah 365 µg/Nm³. Hal ini berarti konsentrasi SO₂ di 4 titik sampling tersebut memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient.

d. Impact

Penurunan kualitas udara akan menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan manusia. Gangguan kesehatan dapat berupa ISPA dan penyakit paru-paru, sedangkan dampak terhadap lingkungan lainnya yaitu menimbulkan hujan asam, rusaknya konstruksi, dan timbulnya penyakit pada tanaman.



e. Response

Melakukan pemantauan udara di lokasi yang berpotensi terjadi pencemaran udara, bekerja sama dengan masyarakat dan perusahaan dalam melaksanakan penghijauan, pengawasan dan penegakan hukum, mewajibkan perusahaan yang menghasilkan emisi untuk melakukan pengelolaan dan melaporkan hasil uji kualitas udara emisi setiap 6 (enam) bulan. Untuk mengatasi semakin meningkatnya pencemaran debu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat taman taman selain untuk keindahan kota juga sebagai penyerapan debu

4. Resiko Bencana

a. Driving Force

Resiko bencana dapat didorong karena kondisi geografis yang memang sudah memiliki resiko terjadi bencana, maupun resiko yang muncul dikarenakan perilaku hidup manusia

b. Pressure

Tekanan pada resiko bencana meliputi interaksi-interaksi berikut ini : kondisi alam dan lingkungan yang dapat menyebabkan resiko bencana, aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan resiko bencana

c. State

Di tahun 2019 kecamatan Mendahara Ulu terendam banjir yang menggenangi rumah masyarakat sebanyak 196 KK tetapi tidak menimbulkan kerugian, Kabupaten Tanjung



Jabung Timur tidak mengalami bencana baik gempa bumi, maupun tanah longsor

d. Impact

Dampak dari adanya resiko bencana adalah potensi kehilangan nyawa (kematian penduduk), kerugian harta, kerusakan bangunan, maupun dampak psikis karena adanya trauma pasca bencana

e. Response

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat pemetaan daerah rawan bencana, dan upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dibawah koordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan tim dengan mobilitas tinggi.

5. Perkotaan

a. Driving Force

Jumlah penduduk Kecamatan Muara Sabak Barat dari tahun 2015 berjumlah 16.886 jiwa mengalami peningkatan menjadi 17.186 Jiwa ditahun 2016, namun kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 17.478, kemudian kembali mengalami kenaikan menjadi 17.789 jiwa ditahun 2018 dan 18.092 jiwa ditahun 2019

b. Pressure

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan jumlah rumah tangga miskin hanya mencapai 36,15%, pada Kecamatan Muara Sabak Barat sebagai rencana perkotaan berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 menunjukkan pada Kecamatan tersebut persentasenya



lebih rendah dari KabupatenTanjung Jabung Timur secara keseluruhan

c. State

Besarnya produksi sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbanding lurus dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019, produksi sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan mencapai 109,21kg/hari, dengan demikian maka diperkirakan Timbulan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu tahun diperkirakan 39.860,37 ton.

d. Impact

Dari data diatas ISPA masih berada pada posisi 3%, hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada Indeks Kualitas Udara yang baik. Penyakit sakit kepala pada urutan pertama 17%, selanjutnya Gastritis 15%.

e. Response

Untuk sampah yang dapat diangkut dan di buang ke TPA Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyediakan TPA dengan metode sanitari landfill.

f. Tata Kelola

a. Driving Force

Praktek pelaksanaan tata kelola suatu daerah akan dipicu oleh berbagai faktor diantaranya adalah prilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan, Perkembangan usaha/kegiatan, dan Kondisi perekonomian suatu daerah.



b. Pressure

Tekanan yang mempengaruhi kinerja tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan akibat kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat itu sendiri maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan. Selain itu anggaran pengelolaan lingkungan yang dipicu oleh pendapatan daerah juga menjadi tekanan dalam kinerja tata kelola

c. State

Jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah personil di DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 19 orang yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Terdapat 2 personil yang telah menamatkan pendidikan master (S2), 10 orang berpendidikan sarjana (S1), 4 orang berpendidikan diploma (D3/D4), dan 3 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

d. Impact

Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 9 penghargaan, 2 penghargaan sebagai Nominator Penyusunan SLHD dan DIKPLHD Nasional dan 7 penghargaan tingkat Provinsi Jambi.

e. Response

Mendorong kegiatan pengelolaan lingkungan yang diinisiasi oleh masyarakat, peningkatan anggaran untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu lingkungan hidup memiliki dimensi yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai sendi-sendi kehidupan umat



manusia di permukaan bumi sehingga jumlah isu lingkungan di suatu daerah bisa sangat banyak. Namun demikian, dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, isu lingkungan hidup yang akan dibahas secara mendalam adalah yang bersifat utama atau yang menjadi prioritas.

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup dilaksanakan melalui Forum Grup Discussion (FGD), yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, perwakilan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta anggota tim data dan tim penyusun DIKPLHD Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2019. Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan nantinya akan diperoleh isu prioritas lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu prioritas atau sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Juknis Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2018.

Analisis hasil pengelompokan isu lingkungan hidup dengan mempertimbangkan tekanan atau penyebab yang terjadi, kondisi saat ini dan upaya peningkatan kualitas lingkungan, serta berdasarkan pada ketersediaan data isu prioritas atau isu utama lingkungan hidup adalah :

1. Peningkatan timbulan sampah
2. Kebakaran hutan dan lahan
3. Alih fungsi lahan

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan beberapa inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat

melalui Sosialisasi Edukasi Pelajar Peduli Api, Pengendalian vektor dengan pelaksanaan PSN di Kab. Tanjung Jabung Timur, Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Penyuluhan tentang pengendalian vektor penyakit menular (malaria , DBD).

Gotong royong, mendorong pelaksanaan Gotong Royong Pengumpulan sampah Plastik di lingkungan masyarakat kecamatan Dendang, Gotong royong pembersihan pengaliran air pada tempat yang tersumbat

2. Kelembagaan

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Tanjabtim telah mengeluarkan izin dan kebijakan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya adalah izin bagi kegiatan pembangunan perkebunan dan tambang galian C dari aspek produk hukum yang terkait dengan bidang pengelolaan lingkungan hidup.

3. Anggaran

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanjabtim memperoleh anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp. 6.494.692.000 Sedangkan pada tahun 2018 anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp. 6.147.342.691,- terjadi Peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018

4. Personil

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas dengan jumlah 19 orang yang harus melaksanakan



pengawasan/pemantauan lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah mengirimkan tenaga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis baik yang diadakan di pusat, regional maupun provinsi.

5. Pengembangan Jejaring Kerja

Dalam meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seharusnya dibutuhkan staf fungsional di bidang lingkungan yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup. Namun sampai tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mempunyai staf fungsional bidang lingkungan, seperti fungsional dampak lingkungan madya, pengendali dampak lingkungan, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

6. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Kepada Publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LAKIP merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah

V. PENUTUP

Isu utama atau isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah dilakukan FGD dan pemantapan isu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan timbunan sampah, kebakaran hutan dan lahan dan alih fungsi lahan, terkait isu persampahan, kebakaran hutan dan



lahan hutan, merupakan yang selalu diangkat kepermukaan seperti tahun sebelumnya, karena ini memang menjadi problema setiap tahunnya.

2. Pengelolaan sampah di Tanjung Jabung Timur khususnya di kawasan permukiman warga masih kurang memadai. Jumlah sampah yang diproduksi di Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2019 mencapai 49.000 ton, yang sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga.
3. Hampir setiap tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan ini dapat terjadi karena kondisi lahan di kabupaten Tanjung Jabung Timur 62,98 persen merupakan kawasan gambut.
4. Terjadinya alih fungsi lahan karena penambahan penduduk yang terus terjadi sehingga kebutuhan akan lahan perumahan setiap tahun mengalami peningkatan, jumlah penduduk Tanjung Jabung Timur Tahun 2009, sebesar 219.985 jiwa dengan angka pertumbuhan 0,74% yang dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian serta migrasi yang tidak berimbang sehingga membutuhkan lahan untuk pembangunan dan akan mengurangi luasan lahan pertanian ataupun hutan. Pada tahun 2017 luas sawah 23.536 hektar dan tahun 2019 menjadi 10.523 hektar.